

MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA

Khotami

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau
thamycoy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara istilah partisipasi tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kegiatan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik. Kegiatan pembangunan di pedesaan seringkali dihadapkan dengan persoalan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, juga termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga berkaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya dorongan dan inovasi untuk dapat mewujudkan partisipasi sebagai langkah untuk mencapai peningkatan pembangunan desa dengan memiliki modal manusia, kepemimpinan dan modal struktural sebagai komponen pendukung untuk mewujudkan partisipasi masyarakat pedesaan. Maka dari itulah diusahakan langkah-langkah yang positif untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menumbuhkan partisipasi perlu adanya dorongan dan inovasi sebagai modal guna mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain meliputi modal modal manusia, modal kepemimpinan dan juga modal struktural, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam rangka mensukseskan pembangunan di Desa.

Keyword: Partisipasi, Pembangunan dan Desa.

ABSTRACT

Participation is a participation or involvement of a person (individual or community members) in a particular activity. Participation is often associated with development activities. Development is also interpreted as a change to the better. While terms such participation would be clearer if the meaning is directly linked with the development of its own motion. Thus it is related to the growing awareness of the villagers so that they are motivated to make changes actively and towards a better direction. Development activities in rural areas are often faced with the problem of low quality of human resources in rural areas are mostly low-skilled, also including those involved in the administration of the village administration. It also relates to the dynamics of an ever-changing society. Therefore, it is necessary to urge and innovation to realize participation as a step to achieve an increase in rural development by having human capital, structural capital as leadership and supporting components to realize the participation of rural communities. So from that cultivated positive steps to foster community participation in development. To foster the participation of the need for encouragement and innovation as the capital in order to achieve the desired objectives, among others, include capital human capital, leadership capital and structural capital, so that between the government and society occurred harmonious cooperation in realizing the goals of rural development. Therefore, the participation from the community village itself is desirable in order to succeed role in the development of the village.

Keyword: Participation, Development and Village.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan merupakan konsekuensi dari struktur kehidupan sosial yang berkembang dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi dan swadaya masyarakat desa, juga dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan desa. Perlu disadari bahwa masyarakat desa lah yang mengetahui pokok permasalahan yang ada di desa itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu tidak saja berbentuk penerimaan hasil-hasil pembangunan dengan cara memelihara dan memakai saja, tapi juga harus berbentuk pesan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya dalam kaitannya dengan pembangunan ini, daerah pedesaan (termasuk masyarakatnya) dijadikan obyek sekaligus subyek pembangunan. Adapun dalam kaitannya desa sebagai subyek adalah sasaran pembangunan dan sebagai wadah pengembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu sebagai obyek, desa diharapkan turut aktif dalam membina dasar kehidupan bernegara, dengan kata lain masyarakat itu sendiri diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam rangka peningkatan pembangunan di pedesaan. Perlu dipahami dan didalami bahwa desa yang hendak dibangun adalah desa dengan segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Karena desa disamping sebagai obyek dan subyek pembangunan, dimana masyarakat dapat juga diharapkan sebagai penggerak, baik dalam tahap perencanaan pembangunan desa maupun tahap pelaksanaan pembangunan desanya. Pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya dimaknai pada aspek infrastruktur seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan dan bangunan-bangunan fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat desa, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah meliputi pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hal dimaksud juga sangat diharapkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sadu Wasistiono (2006:73) Ketidakberdayaan desa dalam segala aspek disebabkan oleh berbagai masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya oleh hal-hal yang bersifat struktural, antara lain:

- a. Kurang kuatnya keberpihakan pemerintah pusat kepada desa dan masyarakat desa
- b. Kedudukan organisasional yang ambivalen antara organisasi pemerintah formal dengan lembaga kemasyarakatan
- c. Ketidakjelasan status kepegawaian perangkat desa
- d. Pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Pemaknaan terhadap desa sesuai dengan ketentuan aturan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pengertian tersebut, memberikan makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Wasistiono, 2006:83)

Pembangunan desa seperti yang telah dijelaskan diatas, tidak hanya meliputi pembangunan dalam bidang infrastruktur tetapi juga lebih kepada aspek pembangunan manusia yang terkait dengan kemajuan dari masyarakat desa bersangkutan. Oleh sebab itu, berbagai hambatan ditemui dalam rangka peningkatan pembangunan suatu desa yang bisa dilihat dari berbagai aspek baik internal maupun external yang akan dipertegas dengan menumbuhkan kesadaran inovatif baik dari aparat penyelenggara pemerintahan desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di pedesaan antara lain:

- a. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi
- b. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.
- c. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, juga termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d. Lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat Desa dan masih bersifat parsial.

Persoalan seperti diatas, sering dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan pada level pedesaan yang dilatar belakangi oleh faktor ketidakmampuan dari sektor ekonomi juga keterbelakangan sektor pendidikan yang memungkinkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di pedesaan.

Konsep Partisipasi

Secara etimologis perkataan partisipasi berasal dari Bahasa Latin yaitu "*Participare*." Dari Bahasa Latin tersebut kemudian diambil alih dalam Bahasa Inggris yaitu "*To Participate*." Kemudian keduanya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang mempunyai makna yang sama yaitu mengambil bagian atau turut serta. Menurut Theodorson dalam Azis mengemukakan bahwa : "Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu". Dewasa ini partisipasi sering dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara istilah partisipasi tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dari beberapa penjelasan yang ada bahwa partisipasi dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitan ini maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana, 2002:132). Dari uraian tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa pembangunan itu menuntut adanya partisipasi dari masyarakat yang menjalankan pembangunan itu. Sementara itu menurut (Bambang Trisantono: 2011: 4) bahwa partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Selanjutnya Koentjaraningrat (2000) menyebutkan ada dua type partisipasi yang pada prinsipnya berbeda. Yang dikatakan sebagai berikut: "Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua type yang pada prinsipnya berbeda, ialah :

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama-sama proyek pembangunan yang khusus.
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Pada tipe partisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan oleh pemimpin desa atau wakil-wakilnya untuk ikut serta menyumbang tenaga atau hartanya dalam menunjang keberhasilan pembangunan proyek yang bersifat khusus. Biasanya proyek yang demikian bersifat fisik, contohnya partisipasi masyarakat desa membantu mengerjakan proyek inpres bantuan desa, inpres penghijauan dan melebarkan desa. Sedangkan pada tipe kedua, tidak ada aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada program pembangunan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat atas kemauan atau atas kesadaran individual. Dalam hal ini contohnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan modal nasional yaitu Tabanas, Program Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dua tipe partisipasi itu mempunyai prinsip berbeda. Pada tipe yang pertama tumbuhnya partisipasi dari rakyat pedesaan belum secara spontanitas timbul, namun mereka masih perlu untuk diajak, dibujuk, diperintah atau bahkan dipaksa oleh pihak atas, agar mereka memberikan partisipasinya secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam tipe kedua, partisipasi cenderung atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi pada tipe partisipasi yang kedua ini timbul berdasarkan atas keputusan mereka sendiri sebagai individu yang utuh. Jadi pada dasarnya bahwa partisipasi itu dilakukan dengan prinsip kesukarelaan dari pihak masyarakat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Selain daripada itu tidak ada sanksi fisik bila tidak melakukan kegiatan partisipasi tersebut, yang ada hanyalah sanksi moral terhadap individu yang tidak melakukan partisipasi tersebut.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemanto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok social dan organisasi, mengambil peran serta ikut

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. (<http://turindraatp.blogspot.com>)

Konsep Pembangunan

Pembangunan Nasional Negara Indonesia dimaksudkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan masyarakat adalah merupakan suatu pendekatan yang sering kita dengar dan didengungkan oleh pemerintah, sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan masyarakat sebagai alat pendekatan dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf hidup, maka dari itu sasaran pembangunan itu sebenarnya adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sasaran utama pembangunan adalah manusia maka dari itu sangat berkaitan dengan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat.

Menurut Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)” (<http://profsyamsiah.wordpress.com>). Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang terus menerus dilaksanakan. Selain itu pembangunan juga merupakan usaha yang secara sadar untuk mengadakan perubahan untuk menuju ke suatu keadaan yang lebih baik, dimana pembangunan itu tidak hanya pada bidang tertentu saja melainkan juga dalam segala aspek-aspek kehidupan bangsa. Dan dari pengertian yang dikemukakan oleh Siagian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Pembangunan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar.
- Pembangunan itu merupakan suatu proses yang harus terus menerus dilaksanakan meskipun secara bertahap dalam periode tertentu.
- Pembangunan itu dilaksanakan secara berencana serta berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- Pembangunan itu mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta berkemampuan untuk mengembangkan hidupnya secara nasional.
- Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, artinya berbagai aspek kehidupan.

Pembangunan Desa itu adalah suatu bentuk pembangunan yang didalamnya terdapat keikutsertaan yang dilakukan oleh warga obyek pembangunan tersebut. Selain daripada itu pembangunan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat yang menyeluruh yang artinya meliputi segala aspek kehidupan rakyatnya, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Pembangunan Desa itu diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam menunjang proses pembangunan yang sedang digalakan. Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan dan karena kita hidup berdasarkan Pancasila maka tidak mengherankan bila proses pembangunan tersebut juga harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila.

Kedudukan akan struktur dan komposisi masyarakat pedesaan lama kelamaan menunjukkan hasil yang berbeda. Peran masyarakat dalam upaya pengembalian nilai-nilai lama perlu disadari sebagai suatu realitas yang dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kaerah yang lebih kondusif. Landasan pemikiran inilah yang mendasari

perlunya mengembangkan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dengan tiga fungsi pokok yakni: sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat dan agen pembaharuan (Wasistiono, 2006:84).

Konsep Desa

Istilah Desa itu sangat menyangkut masyarakat, maka perlu dimengerti terlebih dahulu pengertian dari masyarakat. Adapun yang dimaksud masyarakat. Menurut Sumarjan “Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.” (<http://smileboys.blogspot.com>). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2000) : “Masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat tertentu serta terikat oleh suatu aturan yang berlaku.

ANALISIS KAJIAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan mengenai aspek hambatan dalam peningkatan kegiatan pembangunan pedesaan diatas, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai perwujudan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di pedesaan. Langkah-langkah tersebut direalisasikan dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh unsur yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan desa tanpa melupakan unsur masyarakat sebagai agen penggerak kegiatan pembangunan di pedesaan.

Istilah partisipasi yang meliputi keikutsertaan dan turut ambil bagian oleh masyarakat dimaknai sebagai sebuah pengalaman yang menunjukkan bahwa pengaturan terhadap pemerintah desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan. Penyeragaman pengaturan masyarakat masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya akan membuatnya tertinggal dibanding dengan masyarakat lainnya. Hal ini akan terkait dengan konsep dasar tentang cara menumbuhkan pola pikir yang inovatif. Inovasi dimaknai sebagai suatu proses memikirkan dan

mengimplementasikan pemikiran, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan dan lain sebagainya (Djamaluddin, 2012:35).

Tahap-tahap Partisipasi

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi menurut Turindra adalah sebagai berikut :

- Tahap-tahap Partisipasi. Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayahnya.
- Tahap Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target.
- Tahap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan sebagainya.
- Tahap Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.
- Tahap Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan. Partisipasi dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.”(<http://turindraatp.blogspot.com>).

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa partisipasi sangat diperlukan. Hanya saja

minat untuk ikut serta dalam pembangunan pada masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting dalam syarat tumbuhnya partisipasi. Untuk menumbuhkan partisipasi perlu adanya dorongan dan inovasi sebagai modal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Secara garis besar ada tiga komponen modal organisasi yang mendukung inovasi seperti yang dikatakan oleh (Djamiluddin, 2012: 58), yakni:

a. Modal Manusia (Human Capital)

Sebagian besar persoalan dalam organisasi terletak pada persoalan manusia. Jika komponen manusia sebagai modal organisasi tersebut baik, maka sedikit banyak akan menjadi penggerak keunggulan sebuah organisasi. Sebaliknya, jika kemampuan manusianya kurang mumpuni, maka akan membawa pengaruh terhadap jalannya kelancaran sebuah organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuatu yang urgen dalam konteks pembangunan di tingkat pedesaan yang perlu dikembangkan adalah pola pikir dari masyarakat desa untuk dapat menumbuhkan kreativitas, intelektual, emosional, sosial dan juga keuletan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pedesaan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Djamiludin, 2012:59 bahwa ada beberapa aspek modal manusia yang mendukung inovasi. Pertama, modal kreativitas yang melekat pada individu untuk menghasilkan gagasan baru yang ada kaitannya dengan kegiatan pembangunan di desa. Kedua, modal intelektual yang diwujudkan dalam luasnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan belajar terus menerus. Oleh sebab itu, pengetahuan dan keterampilan juga diperlukan sebagai modal dalam rangka peningkatan pembangunan di pedesaan. Ketiga, modal emosional yang ditandai dengan kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain yang mana hal ini diperlukan oleh masyarakat desa juga unsur penyelenggara desa. Keempat, modal sosial yang ditunjukkan dengan adanya rasa saling percaya yang dalam hal ini merupakan hubungan yang perlu dibangun dengan rasa saling percaya oleh pemerintah desa juga masyarakat desa sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan desa. Kelima, modal keuletan yang diwujudkan dengan ketabahan dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan. Keenam, modal moral dan integritas. Ketujuh, modal kesehatan yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dimiliki oleh masing-masing komponen.

b. Modal Kepemimpinan (Leadership Capital)

Pemimpin yang diperlukan untuk kemajuan sebuah organisasi adalah pemimpin yang mampu menumbuhkan inovasi dan mempunyai pandangan jauh ke depan dengan mensinergikan unit, divisi juga sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan bersama yakni pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk menginspirasi masyarakat. Selain itu, pemimpin transformasional dapat merangsang masyarakat untuk berfikir dan mencoba gagasan baru. Selain itu, yang dimaksudkan melalui kepemimpinan transformasional yakni memiliki kepedulian terhadap sesama yang dalam hal ini adalah peran pemimpin desa terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

c. Modal Struktural (Structural Capital)

Struktur biasanya sangat terkait dengan sistem pengambilan keputusan. Sulitnya mendapatkan persetujuan untuk memperoleh dukungan sumber daya untuk merealisasikan inovasi membuat komponen tertentu yang inovatif frustrasi dan menghentikan inovasi yang dia lakukan. Oleh sebab itu, sinkronisasi diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan pembangunan di pedesaan, tentunya diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini dimaknai dengan adanya turut serta dan partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, apa yang penulis ingin sampaikan disini adalah bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat ini diperlukan sinergi antara ketiga modal yang meliputi modal manusia yang digambarkan dalam peran serta masyarakat, kemudian diikuti dengan modal kepemimpinan yang menuntut adanya peran dari pemerintah desa untuk mentransformasikan nilai-nilai kreatifitas dan dorongan-dorongan yang mengarah kepada kemajuan pembangunan di pedesaan. Selanjutnya modal struktural juga menentukan hubungan antarmanusia dalam organisasi. Dalam struktur organisasi, ada pemimpin ada yang dipimpin, ada pemerintah desa dan ada masyarakat desa.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Desa Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah

pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam Adimihardja (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa?
- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
- e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.
- f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
- g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
- h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
- i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
- j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

Menurut Slamet dalam Azis menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu :

- Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
- Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
- Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, maka masyarakat desa akan merasa kesulitan dalam menumbuhkan rasa partisipasinya dalam pembangunan. Karena pada umumnya masyarakat desa lebih mengutamakan sistem partisipasi top-down. Hal ini disebabkan masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat desa itu, maka merupakan sumbangan penting bagi berhasilnya Pembangunan Nasional. Hal ini telah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Berikut beberapa hal dapat dirangkum dari penjelasan diatas yakni:

- a. Bahwa dalam usaha untuk mendorong partisipasi masyarakat serta dalam usaha memberikan pengarahan kepada masyarakat peranan Kepala Desa sangat diperlukan.
- b. Bahwa suatu masyarakat Desa yang masih memegang teguh dan memelihara sistem gotong royong, maka partisipasi masyarakat akan terlaksana dengan baik.
- c. Dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam bentuk dana, tenaga, ide maupun dalam pengambilan keputusan serta dalam perealisasiannya, akan membuat suatu desa maju dalam pembangunan. Walaupun tingkat partisipasi desa yang satu dengan desa yang lain berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya kesadaran yang tinggi dari warga karena adanya kekompakan antara aparat pemerintahan desa dengan masyarakatnya yang hasilnya dapat secara langsung dan nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- d. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan hasil yang telah dicapai dalam pembangunan dapat dinikmati serta dimanfaatkan masyarakat.

- e. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat perlu didukung dengan adanya inovasi dalam organisasi yang meliputi modal manusia, modal kepemimpinan dan modal struktural.

Maka dari itulah diusahakan langkah-langkah yang positif untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sehingga antara pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam rangka mensukseskan pembangunan di Desa. Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya partisipasi ini masyarakat justru menjadi pihak yang dirugikan, sebab seringkali model pembangunan yang top down hanya menekankan target kuantitas saja tanpa memikirkan kualitas sehingga hal inilah yang seringkali menurunkan semangat partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ancok, Djamaluddin, 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Erlangga, Jakarta.
- Budi, Santoso, 1998, Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa, UPD, Kediri
- Hakim, Abd, 2008, *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*, Edisi Pertama, Malang, Bayu Media Publishing Internet
- _____, “Pengertian Partisipasi”, diakses pada tanggal 4 April 2015 pukul 09.33 di <http://turindraatp.blogspot.com>
- _____, “Pengertian Pembangunan”, diakses pada tanggal 4 April 2015 pukul 09.45 di <http://profsyamsiah.wordpress.com>
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*, Edisi Kesembilan Belas, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Soemantri, Bambang Trisantono, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Syafi’i, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Thohir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media, Bandung.